

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya. *Sejarah HAM Dalam Perspektif Barat, Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*. CESDA LP3E, Jakarta. 2000.
- Arinanto, Satya, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2008.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1995.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung. 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2008.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta. 1988.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011.
- Henry, Nicholas. *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan*, Terjemahan Luciana, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan 11. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- KOMNAS-HAM, *Hak Asasi Manusia: Tanggung jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta, 1999.
- Sanit, Arbi. *Ormas dan Politik*. Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, Jakarta, 1995.

Suhino. *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta, 2010.

Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

Agnes, Veronica Sianipar. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, e-journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014.

Mursitama, Tirta Nugraha. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Jakarta, 2011.

Muslih, M. “*Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*”. Jurnal Legalitas, Vol. IV, Nomor 1. Edisi Juni 2013.

Novianti. *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan*, Jurnal Puslit Vol. IX, No 14/II/Puslit/Juli/2017, Jakarta. 2017.

Pratiwi, Dian Kus. *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.2, 2017.

Sudjito, *Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu ormas dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarakat*, makalah: QUO VADIS PERPPU ORMAS, FH UII. 2017.

Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000.

Winata, Muhammad Reza. *Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum oleh Pemerintah*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18 No.4, Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. UU Nomor 16 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 239. TLNRI Nomor 6139.

_____. *Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. UU Nomor 17 Tahun 2013. TLNRI Nomor 5430.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. TLNRI Nomor 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 26 Tahun 2000. LNRI Tahun 2000 Nomor 208.

D. Artikel Internet

Arti Asas *Contrarius Actus*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-contrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08>. diakses pada 10 Maret 2022.

Fabian Januarius Kuwado dan Kristian Erdianto, “*Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas*”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/initigapertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas> , diakses Pada tanggal 20 September 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Indonesia. *Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota dan/atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017*, dapat diakses dalam <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no22017/> . diakses pada 21 April 2022.

Irmasari, Dewi. “*Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas*” dalam <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses Pada tanggal 20 September 2022.

Rilis Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas. “*Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum*”. Jakarta, 24 Juli 2017, dapat diakses dalam <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Perppu-Ormas-24Jul17.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Soedarmedi, *Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut*, dari: <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017->

[isinya-luar-biasa-fpidansejenisnya-apa-kabar-nanti/](#), diakses Pada 22 September 2022.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada 10 Desember 1948. Hari kelahiran ini yang kemudian dikenal sebagai hari Hak Asasi Manusia Internasional. Deklarasi ini telah ditranslate ke dalam 375 bahasa dan dialek. Dapat diakses dalam <https://sekitarkita.com/2009/06/deklarasi-uiversal-hak-asasi-manusia/> . diakses pada tanggal 22 April 2022.